



---

## **Penguatan Peran RT dan RW dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Pustaka atas Kebijakan Peningkatan Insentif RT/RW di Kota Probolinggo**

---

### **INFO PENULIS**

Husni Mubaroq  
Universitas Panca Marga  
[Husni999fisip@upm.ac.id](mailto:Husni999fisip@upm.ac.id)  
  
M. Masyhuri  
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo  
[m.masyhuri96@gmail.com](mailto:m.masyhuri96@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 2808-1307  
Vol. 6, No. 1, April 2026  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi***

Mubaroq, H., & Masyhuri, M. (2026). Penguatan Peran RT dan RW dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Studi Pustaka atas Kebijakan Peningkatan Insentif RT/RW di Kota Probolinggo. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1505-1518.

### **Abstrak**

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berbasis masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi strategis sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada paling dekat dengan warga serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam berbagai aktivitas pelayanan publik dan pembangunan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penguatan peran RT dan RW dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui studi pustaka terhadap kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research, yang memanfaatkan analisis dokumen kebijakan, literatur administrasi publik, serta kajian governance lokal sebagai sumber data utama. Analisis dilakukan menggunakan metode content analysis untuk mengidentifikasi konsep governance, kebijakan pemberdayaan kelembagaan komunitas, serta implikasi kebijakan peningkatan insentif RT/RW terhadap praktik tata kelola pemerintahan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa RT dan RW memiliki peran penting sebagai aktor komunitas dalam mendukung implementasi kebijakan publik, pengelolaan informasi sosial masyarakat, serta mobilisasi partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan. Kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo dapat dipahami sebagai strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan motivasi pelayanan, serta memperkuat legitimasi sosial RT/RW dalam struktur pemerintahan lokal. Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah berpotensi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik serta memperkuat praktik community governance yang partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penguatan peran RT/RW dapat menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas.

**Kata kunci:** Governance Lokal, RT/RW, Kelembagaan Komunitas, Kebijakan Publik, Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

### Abstract

The decentralisation of government in Indonesia positions local authorities as the primary actors in delivering public services and community-based development. Within this framework, Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) occupy a strategic role as community institutions that are closest to residents and act as intermediaries between local government and citizens in various public service and local development activities. This study aims to conceptually analyse the strengthening of RT and RW roles in local governance through a literature-based examination of the policy to enhance RT/RW incentives in the City of Probolinggo. Employing a qualitative approach via library research, the study utilises policy documents, public administration literature, and local governance studies as primary data sources. Content analysis was conducted to identify governance concepts, community institution empowerment policies, and the implications of RT/RW incentive enhancement for local governance practices. The findings indicate that RT and RW play a crucial role as community actors in supporting public policy implementation, managing social information, and mobilising citizen participation in various development programmes. The RT/RW incentive policy in Probolinggo can be seen as a strategy to empower community institutions by strengthening institutional capacity, enhancing service motivation, and reinforcing the social legitimacy of RT/RW within local governance structures. Strengthening RT/RW institutional capacity through local government support has the potential to improve the effectiveness of public policy implementation and to reinforce participatory, collaborative, and responsive community governance practices. Consequently, enhancing the role of RT and RW constitutes a key strategy for improving the quality of community-based local governance.

**Key Words:** Local Governance, RT/RW, Community Institutions, Public Policy, Local Government Governance.

### A. Pendahuluan

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia merupakan paradigma penting dalam reformasi administrasi publik yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan lokal, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Melalui kerangka desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan publik, serta mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Dalam konteks tersebut, keberadaan struktur sosial-administratif berbasis komunitas menjadi elemen strategis yang mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya melalui lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). RT dan RW tidak hanya berfungsi sebagai unit organisasi sosial terkecil dalam struktur pemerintahan lokal, tetapi juga memainkan peran penting sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penyampaian informasi, koordinasi kegiatan sosial, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi pada tingkat lingkungan. Secara empiris, RT dan RW memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan warga sehingga mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih akurat serta memfasilitasi berbagai bentuk partisipasi kolektif dalam pembangunan lokal. Selain itu, peran kelembagaan RT dan RW juga berkaitan erat dengan praktik tata kelola pemerintahan berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi antara negara dan masyarakat dalam mengelola berbagai persoalan sosial di tingkat lokal. Dalam perspektif kelembagaan pemerintahan lokal, penguatan peran RT dan RW juga berkaitan dengan legitimasi sosial serta efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat akar rumput, terutama dalam memastikan bahwa proses pemerintahan berlangsung secara partisipatif, transparan, dan demokratis (Kurniawan et al., 2023).

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam struktur pemerintahan lokal di Indonesia menempati posisi yang sangat strategis sebagai institusi sosial-administratif yang berada paling dekat dengan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan berbasis komunitas, RT dan RW berfungsi sebagai aktor intermediari yang menjembatani relasi antara pemerintah daerah dengan warga dalam berbagai aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan administrasi kependudukan, serta koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat lingkungan (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Melalui kedekatan sosial

dan interaksi yang intensif dengan warga, RT dan RW memiliki kapasitas institusional yang relatif lebih adaptif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengelola data kependudukan secara mikro, serta memfasilitasi berbagai program pemerintah agar dapat diimplementasikan secara efektif pada level komunitas. Peran tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial seperti deteksi dini terhadap potensi permasalahan sosial, penguatan solidaritas warga, serta pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan lokal. Dalam praktiknya, ketua RT sering kali menjadi aktor yang paling memahami kondisi sosial warganya, termasuk informasi mengenai struktur keluarga, kondisi kesehatan masyarakat seperti keberadaan ibu hamil dan balita, hingga dinamika sosial yang berkembang dalam lingkungan permukiman. Kondisi ini menunjukkan bahwa RT dan RW memiliki posisi penting dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berbasis komunitas, karena mereka mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat dengan kebijakan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput (Amanullah, 2025).

Dalam kerangka penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas, Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun 2026 menetapkan kebijakan strategis berupa peningkatan honorarium bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi sebesar Rp1.000.000 per bulan dari sebelumnya Rp400.000 per bulan. Kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan bagi pengurus lembaga kemasyarakatan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan RT/RW dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal. Dalam perspektif administrasi publik, pemberian insentif terhadap aktor kelembagaan di tingkat komunitas merupakan strategi penting dalam meningkatkan motivasi pelayanan, legitimasi sosial, serta kualitas partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan daerah (Susanti et al., 2025). RT dan RW selama ini berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, mulai dari pengelolaan administrasi kependudukan, fasilitasi kegiatan sosial, hingga menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan insentif tersebut mencerminkan pengakuan pemerintah daerah terhadap peran strategis RT/RW sebagai mitra kolaboratif dalam proses implementasi kebijakan publik di tingkat akar rumput. Dalam berbagai kajian mengenai *governance* lokal, penguatan kapasitas institusi komunitas seperti RT/RW terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta memperkuat praktik pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Hidayat et al., 2021). Selain itu, kelembagaan lokal yang didukung oleh kebijakan pemerintah juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tingkat lingkungan (Amanullah, 2025).

Selain sebagai bentuk penghargaan simbolik dari pemerintah daerah terhadap kontribusi sosial pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), kebijakan peningkatan insentif juga dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas dalam sistem tata kelola pemerintahan lokal. Dalam perspektif administrasi publik dan *governance* lokal, pemberian insentif kepada aktor kelembagaan di tingkat komunitas memiliki implikasi penting terhadap peningkatan motivasi pelayanan, komitmen sosial, serta profesionalitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik yang bersifat langsung kepada Masyarakat (Dwiyanto, 2021). RT dan RW selama ini berperan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah, mulai dari pendataan kependudukan, fasilitasi kegiatan sosial, hingga koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan insentif dapat dipahami sebagai upaya pemerintah daerah untuk memperkuat legitimasi sosial sekaligus meningkatkan kinerja institusional RT/RW dalam mengelola berbagai dinamika sosial masyarakat secara lebih responsif dan partisipatif. Berbagai kajian mengenai kelembagaan lokal menunjukkan bahwa dukungan kebijakan pemerintah, termasuk dalam bentuk insentif dan penguatan kapasitas kelembagaan, mampu meningkatkan efektivitas peran institusi komunitas dalam mendukung pembangunan lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Adhibah et al., 2022). Selain itu, penguatan peran kelembagaan komunitas juga berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih kolaboratif, di mana interaksi antara pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih adaptif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di tingkat lokal (Deviyanti & Harmawan, 2023).

Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, kebijakan peningkatan insentif bagi lembaga kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan bagi para pengurusnya,

melainkan juga sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan partisipatif. Kelembagaan RT dan RW memiliki karakteristik khas sebagai institusi sosial yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki potensi besar dalam menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan warga di tingkat akar rumput (Susanti et al., 2025). Oleh karena itu, dukungan kebijakan pemerintah daerah - termasuk dalam bentuk pemberian insentif, fasilitasi kelembagaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia - menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi komunitas tersebut dalam menjalankan fungsi pelayanan sosial, koordinasi kegiatan kemasyarakatan, serta implementasi berbagai program pembangunan berbasis masyarakat. Dalam berbagai kajian *governance* lokal, penguatan kapasitas institusi komunitas terbukti mampu mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat, memperkuat jaringan sosial di tingkat lingkungan, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik yang memerlukan keterlibatan aktif warga (Adhibah et al., 2022). Selain itu, pendekatan tata kelola kolaboratif yang melibatkan aktor komunitas juga diyakini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah di tingkat lokal karena proses implementasinya berlangsung melalui mekanisme partisipatif yang lebih inklusif (Deviyanti & Harmawan, 2023). Dengan demikian, kajian akademik mengenai kebijakan peningkatan insentif RT dan RW menjadi penting untuk dianalisis secara lebih mendalam guna memahami sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendorong terciptanya sistem *governance* lokal yang lebih responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Berangkat dari konteks penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara konseptual dan kebijakan mengenai penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan lokal melalui pendekatan studi pustaka terhadap kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo (Sanur et al., 2025). Dalam kerangka administrasi publik modern, kelembagaan komunitas seperti RT dan RW dipandang sebagai elemen strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat karena memiliki kedekatan sosial serta pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kondisi sosial warga di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah daerah yang diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW menjadi bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kebijakan peningkatan insentif RT/RW tidak hanya dimaknai sebagai bentuk dukungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang berpotensi memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan motivasi pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan menelaah berbagai literatur akademik, regulasi pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan guna memahami dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah daerah dan penguatan peran kelembagaan komunitas dalam praktik *governance* lokal. Kajian ini menjadi penting karena penguatan kapasitas institusi komunitas terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan lokal (Adhibah et al., 2022; Deviyanti & Harmawan, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya terkait model penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas melalui optimalisasi peran RT dan RW sebagai aktor strategis dalam *governance* lokal.

Berdasarkan dinamika penguatan tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang berfokus pada analisis konseptual mengenai posisi strategis Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem *governance* lokal (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Dalam konteks administrasi publik, keberadaan RT dan RW tidak hanya dipahami sebagai struktur sosial kemasyarakatan, tetapi juga sebagai institusi komunitas yang memiliki peran penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat pada tingkat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara analitis bagaimana posisi strategis RT dan RW dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, serta implementasi program pembangunan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana kebijakan peningkatan honorarium RT dan RW di Kota Probolinggo dipahami dalam perspektif kebijakan

publik, terutama dalam kaitannya dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas sebagai mitra strategis dalam pembangunan lokal. Dalam berbagai studi administrasi publik, dukungan kebijakan terhadap institusi lokal terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas implementasi kebijakan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan (Adhibah et al., 2022). Lebih lanjut, penelitian ini juga berupaya menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berpotensi memperkuat peran RT dan RW dalam tata kelola pemerintahan daerah serta implikasinya terhadap penguatan model *governance* berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial di tingkat lokal (Deviyanti & Harmawan, 2023). Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk memahami hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, penguatan kelembagaan komunitas, dan praktik tata kelola pemerintahan lokal yang partisipatif.

Tujuan penelitian dalam studi ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman konseptual dan analitis mengenai penguatan peran kelembagaan komunitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai institusi sosial-administratif yang memiliki kedekatan struktural dengan masyarakat serta berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan warga dalam berbagai aktivitas pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam kebijakan peningkatan insentif RT/RW di Kota Probolinggo sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal, meningkatkan motivasi pelayanan, serta mendorong efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat lingkungan. Dalam perspektif administrasi publik dan *governance* lokal, dukungan kebijakan terhadap institusi komunitas dipandang sebagai faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan daerah (Adhibah et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi kontribusi kebijakan peningkatan insentif tersebut terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam menciptakan sistem *governance* yang lebih responsif, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual mengenai penguatan *governance* berbasis komunitas melalui optimalisasi peran RT dan RW sebagai aktor strategis dalam praktik tata kelola pemerintahan lokal, di mana interaksi antara institusi pemerintah dan masyarakat dapat berlangsung secara lebih adaptif dan inklusif dalam menghadapi berbagai dinamika sosial di tingkat lokal (Adhibah et al., 2022).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian administrasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis komunitas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ilmiah dalam bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kajian *governance* lokal, *community-based governance*, serta penguatan kelembagaan sosial dalam sistem pemerintahan daerah. Keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai institusi sosial yang beroperasi pada tingkat komunitas memiliki posisi strategis dalam menjembatani relasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga kajian mengenai peran dan penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW menjadi penting dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam berbagai studi administrasi publik, institusi komunitas yang didukung oleh kebijakan pemerintah terbukti mampu memperkuat partisipasi masyarakat serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik pada tingkat lokal (Adhibah et al., 2022). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan model *governance* berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan RT dan RW sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lingkungan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi mengenai *governance* lokal dan penguatan kelembagaan komunitas dalam administrasi publik. Adapun bagi praktisi pemerintahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan berbasis komunitas melalui optimalisasi peran RT dan RW sebagai aktor penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang kolaboratif dan partisipatif (Deviyanti & Harmawan, 2023).

## B. Metodologi

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai strategi utama untuk memahami secara konseptual dan analitis dinamika kebijakan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam berbagai konsep, teori, serta kebijakan yang berkaitan dengan peran kelembagaan komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam sistem pemerintahan lokal. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai sumber literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan pemerintah, serta regulasi yang relevan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan komunitas, dan praktik *governance* lokal (Sari et al., 2025). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini meliputi tiga perspektif utama. Pertama, pendekatan kebijakan publik, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan peningkatan insentif RT/RW diposisikan sebagai instrumen kebijakan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas serta mendukung implementasi program pembangunan daerah. Kedua, pendekatan *governance*, yang digunakan untuk memahami bagaimana interaksi antara pemerintah daerah dan institusi komunitas dapat membentuk praktik tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, pendekatan kelembagaan, yang menekankan analisis terhadap struktur, fungsi, serta kapasitas institusi komunitas dalam menjalankan peran sosial-administratif dalam sistem pemerintahan lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan multidimensional dalam studi *governance* lokal mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan publik dan peran aktor komunitas dalam pembangunan daerah (Tiawibowo, 2025). Selain itu, penggunaan pendekatan kelembagaan dalam penelitian kebijakan publik juga dinilai efektif dalam menganalisis hubungan antara regulasi, kapasitas organisasi, dan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal (Kartini, 2025).

### 1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah (Haifa et al., 2025). Data primer dalam penelitian ini berupa dokumen kebijakan resmi Pemerintah Kota Probolinggo yang berkaitan dengan kebijakan peningkatan honorarium Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), termasuk publikasi resmi pemerintah daerah, berita kebijakan, serta dokumen kebijakan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan implementasi kebijakan tersebut. Dokumen kebijakan tersebut dianalisis untuk memahami bagaimana pemerintah daerah memosisikan RT dan RW sebagai aktor penting dalam sistem pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Analisis terhadap dokumen kebijakan menjadi penting dalam penelitian kebijakan publik karena dokumen tersebut merepresentasikan keputusan politik dan administratif pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan lokal dalam sistem pemerintahan daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik yang relevan, seperti buku administrasi publik, artikel jurnal ilmiah yang membahas *governance* lokal, serta berbagai dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pemerintahan daerah. Selain itu, publikasi resmi pemerintah daerah juga digunakan sebagai sumber informasi tambahan untuk memahami konteks kebijakan serta dinamika implementasi program pemberdayaan RT/RW di tingkat lokal. Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder dalam penelitian kebijakan publik memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan komunitas, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah (Zein et al., 2026). Pendekatan ini juga memberikan dasar analitis yang kuat dalam memahami bagaimana kebijakan berbasis komunitas dapat memperkuat praktik *governance* yang partisipatif dan kolaboratif dalam sistem pemerintahan daerah.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang relevan dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan pemberdayaan kelembagaan lokal dalam tata kelola pemerintahan daerah (Subagiya, 2023). Metode pertama adalah studi dokumen kebijakan, yaitu proses pengumpulan dan penelaahan terhadap berbagai dokumen resmi

yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo mengenai peningkatan honorarium Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Dokumen tersebut meliputi regulasi pemerintah, publikasi resmi pemerintah daerah, serta dokumen kebijakan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan arah implementasi kebijakan tersebut. Analisis terhadap dokumen kebijakan menjadi penting dalam penelitian kebijakan publik karena dokumen tersebut merepresentasikan keputusan formal pemerintah dalam merumuskan strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas dalam sistem pemerintahan daerah. Metode kedua adalah analisis literatur akademik, yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku administrasi publik, artikel jurnal yang membahas *governance* lokal, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kelembagaan komunitas dan implementasi kebijakan publik. Analisis literatur ini bertujuan untuk membangun landasan konseptual serta kerangka teoritis yang kuat dalam memahami dinamika hubungan antara kebijakan pemerintah dan penguatan kapasitas institusi komunitas. Metode ketiga adalah analisis regulasi, yaitu penelaahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan dan tata kelola pemerintahan daerah guna memahami kerangka hukum yang mendasari keberadaan dan peran RT/RW dalam sistem pemerintahan lokal. Penggunaan ketiga teknik pengumpulan data tersebut memungkinkan penelitian ini memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah, kapasitas kelembagaan komunitas, serta efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

### 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan untuk mengkaji secara sistematis berbagai dokumen kebijakan, literatur akademik, serta regulasi yang berkaitan dengan penguatan peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam tata kelola pemerintahan daerah (Sitasari, 2022). Metode *content analysis* dipilih karena mampu memberikan pendekatan analitis yang mendalam terhadap teks kebijakan dan dokumen akademik dengan cara mengidentifikasi makna, pola, serta hubungan konseptual yang terkandung di dalamnya. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah identifikasi kebijakan, yaitu proses penelusuran dan pengumpulan dokumen kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang berkaitan dengan peningkatan honorarium RT/RW sebagai bagian dari strategi pemberdayaan kelembagaan lokal dalam sistem pemerintahan daerah. Pada tahap ini, peneliti menelaah substansi kebijakan, tujuan program, serta konteks kebijakan yang melatarbelakangi keputusan pemerintah daerah dalam meningkatkan insentif bagi RT/RW. Tahap kedua adalah klasifikasi konsep *governance*, yaitu proses pengelompokan berbagai konsep teoritis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah, seperti konsep *good governance*, *collaborative governance*, serta *community governance* yang relevan dengan peran kelembagaan komunitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Tahap ketiga adalah analisis implikasi kebijakan, yaitu proses interpretasi terhadap bagaimana kebijakan peningkatan insentif RT/RW berpotensi mempengaruhi kapasitas kelembagaan, motivasi pelayanan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Tahap terakhir adalah sintesis konseptual, yaitu proses pengintegrasian berbagai temuan literatur dan dokumen kebijakan untuk membangun kerangka konseptual mengenai penguatan *governance* berbasis komunitas melalui peran RT/RW dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pendekatan analisis isi dalam studi kebijakan publik memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam hubungan antara kebijakan, institusi lokal, dan dinamika *governance* dalam sistem pemerintahan daerah.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Posisi Strategis RT/RW dalam Struktur Pemerintahan Lokal

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi strategis dalam struktur pemerintahan lokal di Indonesia karena berfungsi sebagai institusi sosial-administratif yang menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat pada tingkat lingkungan (Sanur et al., 2025). Dalam sistem pemerintahan berbasis desentralisasi, keberadaan RT/RW menjadi bagian penting dari mekanisme tata kelola pemerintahan yang bersifat partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. RT/RW berperan dalam berbagai aktivitas sosial dan administratif seperti pendataan kependudukan, fasilitasi pelayanan publik, penyampaian informasi kebijakan, serta koordinasi program pembangunan di tingkat komunitas. Kedekatan RT/RW dengan warga menjadikan lembaga ini memiliki kapasitas sosial yang kuat dalam

memahami dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga mampu berperan sebagai mediator antara kepentingan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dalam perspektif *governance* lokal, keberadaan institusi komunitas seperti RT/RW dinilai mampu memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif karena mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan serta pengambilan keputusan pada tingkat lokal (Arifin, 2025).

Selain menjalankan fungsi administratif, RT/RW juga memiliki peran strategis dalam membangun kohesi sosial serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Harfianti et al., 2024). Dalam banyak konteks pembangunan lokal di Indonesia, RT/RW sering kali menjadi aktor utama dalam mobilisasi partisipasi masyarakat untuk mendukung berbagai program pemerintah seperti program kesehatan, pendidikan, keamanan lingkungan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Peran ini menunjukkan bahwa RT/RW tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki legitimasi kuat di tengah masyarakat. Legitimasi tersebut muncul karena RT/RW dipilih atau disepakati oleh warga sebagai representasi kepentingan komunitas di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, penguatan peran RT/RW dalam sistem pemerintahan lokal menjadi penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan daerah dapat berjalan secara partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat (Wisata et al., 2025).

Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, posisi strategis RT/RW juga dapat dipahami melalui perspektif *community governance*, yaitu pendekatan tata kelola yang menempatkan komunitas sebagai aktor penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Susanti et al., 2025). Melalui pendekatan ini, RT/RW dipandang sebagai institusi yang mampu memperkuat jaringan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai aktor lokal lainnya dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik. Kehadiran RT/RW memungkinkan pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif dalam pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik. Selain itu, RT/RW juga berperan dalam mendeteksi berbagai permasalahan sosial di tingkat komunitas secara lebih cepat sehingga pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang partisipatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat (Nuryanto & Sugiyanto, 2024).

### **Kebijakan Peningkatan Insentif RT/RW di Kota Probolinggo**

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Probolinggo dapat dipahami sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas sebagai aktor penting dalam sistem tata kelola pemerintahan lokal (Syaputra, 2023). Kebijakan tersebut diwujudkan melalui peningkatan honorarium RT/RW menjadi Rp1.000.000 per bulan dari sebelumnya sekitar Rp400.000 per bulan, yang dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi RT/RW dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan administrasi kependudukan, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan. Dalam praktik pemerintahan lokal di Indonesia, RT dan RW sering berfungsi sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pemerintah karena memiliki kedekatan sosial yang kuat dengan masyarakat serta kemampuan untuk memfasilitasi koordinasi antara warga dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat motivasi pelayanan, meningkatkan kinerja kelembagaan komunitas, serta memperkuat legitimasi sosial RT/RW dalam menjalankan peran sosial-administratifnya. Dalam perspektif administrasi publik, strategi pemberian insentif kepada aktor komunitas juga merupakan bagian dari pendekatan *incentive-based governance*, yaitu pendekatan kebijakan yang memanfaatkan mekanisme insentif untuk mendorong peningkatan kinerja aktor pelaksana kebijakan di tingkat lokal sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nugraheni et al., 2025).

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif RT/RW juga memiliki implikasi penting terhadap penguatan praktik *governance* berbasis komunitas dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam perspektif *governance modern*, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusi pemerintah, tetapi juga oleh keterlibatan berbagai aktor sosial dalam proses implementasi kebijakan publik dan pembangunan daerah (Nasution et al., 2025). Dalam konteks ini, RT dan RW memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai aktor yang mampu memobilisasi partisipasi warga dalam berbagai kegiatan pembangunan di tingkat lingkungan. Dengan adanya dukungan

kebijakan berupa insentif finansial yang lebih memadai, diharapkan RT/RW dapat meningkatkan komitmen pelayanan, memperkuat koordinasi sosial di tingkat komunitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan daerah. Sejumlah studi menunjukkan bahwa dukungan kelembagaan dan insentif yang memadai bagi aktor komunitas dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas dalam sistem pemerintahan lokal (Sumarto, 2025).

Selain sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi RT/RW, kebijakan peningkatan insentif juga dapat dipahami sebagai strategi pemerintah daerah dalam memperkuat legitimasi kelembagaan komunitas dalam struktur pemerintahan lokal (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Dalam perspektif *governance modern*, institusi komunitas seperti RT dan RW memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat karena mereka berada pada level sosial yang paling dekat dengan warga serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial di tingkat lingkungan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan berupa insentif finansial tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi atas tugas sosial-administratif yang dijalankan oleh RT/RW, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi komunitas tersebut. Dalam berbagai studi mengenai *governance* lokal, dukungan kebijakan terhadap aktor komunitas terbukti mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memperkuat jaringan kolaborasi dalam implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Insentif yang memadai juga berpotensi meningkatkan motivasi pelayanan dan tanggung jawab sosial para pengurus RT/RW dalam menjalankan fungsi mereka sebagai fasilitator partisipasi masyarakat serta mediator komunikasi antara pemerintah dan warga (Wulandjani et al., 2025).

Lebih lanjut, peningkatan insentif bagi RT/RW juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dalam kerangka *governance* partisipatif, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan. RT dan RW dalam hal ini memiliki posisi strategis sebagai aktor yang mampu memobilisasi partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan (Mahlella, 2025). Dengan adanya dukungan insentif yang lebih memadai, RT/RW diharapkan dapat meningkatkan intensitas komunikasi sosial dengan warga, memperkuat koordinasi program pemerintah, serta mendorong terciptanya praktik tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan dan insentif yang memadai dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat praktik *community governance* dalam sistem pemerintahan daerah (Sumarto, 2025).

Lebih jauh, kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan *community governance* dalam sistem pemerintahan daerah. Dalam perspektif *governance* kontemporer, efektivitas implementasi kebijakan publik tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas birokrasi pemerintah semata, melainkan juga oleh tingkat keterlibatan aktor sosial dan komunitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Saa, 2025). RT dan RW dalam hal ini memiliki posisi strategis sebagai institusi komunitas yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memfasilitasi proses partisipasi warga dalam berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan. Melalui dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif, pemerintah daerah berupaya memperkuat motivasi pelayanan serta kapasitas kelembagaan RT/RW agar mampu menjalankan fungsi sosial-administratif secara lebih efektif. Dukungan tersebut juga dapat meningkatkan legitimasi sosial RT/RW sebagai representasi komunitas dalam proses implementasi kebijakan publik. Dalam banyak studi mengenai *collaborative governance*, keterlibatan aktor komunitas yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat terbukti mampu meningkatkan kualitas implementasi kebijakan serta memperkuat jaringan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah (Wulandjani et al., 2025).

Selain itu, keberadaan RT/RW yang diperkuat melalui dukungan kebijakan insentif juga memungkinkan pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi sosial masyarakat di tingkat lingkungan (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Informasi tersebut sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena RT/RW memiliki akses langsung terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya warga di wilayahnya. Dengan demikian, RT/RW tidak hanya berperan sebagai

pelaksana program pemerintah, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual. Dalam perspektif *governance* berbasis komunitas, penguatan kapasitas institusi lokal seperti RT/RW melalui dukungan kebijakan dan insentif yang memadai dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan insentif RT/RW dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat praktik *local governance* yang inklusif dan berbasis komunitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Nuryanto & Sugiyanto, 2024).

### **Implikasi Kebijakan terhadap Penguatan *Governance* Lokal**

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki implikasi yang signifikan terhadap penguatan praktik *governance* lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, tata kelola pemerintahan tidak lagi dipahami semata sebagai mekanisme birokrasi yang bersifat hierarkis, melainkan berkembang menuju model *governance* yang lebih kolaboratif, partisipatif, dan inklusif dengan melibatkan berbagai aktor sosial di luar struktur formal pemerintah (Wahyudi, 2025). Dalam konteks ini, RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan yang berada pada tingkat paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan warga serta memfasilitasi implementasi berbagai kebijakan publik di tingkat lingkungan. Dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif finansial tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi sosial RT/RW, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, koordinasi sosial, serta mobilisasi partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan daerah. Dengan adanya dukungan tersebut, RT/RW diharapkan mampu meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercipta mekanisme tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah mampu meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan sekaligus memperkuat praktik *governance* lokal yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat (Jannah et al., 2025).

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif RT/RW juga berimplikasi terhadap peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kerangka *governance modern*, partisipasi publik dipandang sebagai elemen penting dalam meningkatkan akuntabilitas, legitimasi, serta efektivitas kebijakan publik. RT dan RW memiliki posisi strategis sebagai aktor komunitas yang mampu memobilisasi partisipasi warga dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan, seperti program kesehatan masyarakat, keamanan lingkungan, pengelolaan kebersihan lingkungan, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Nuryanto & Sugiyanto, 2024). Dengan adanya dukungan kebijakan yang memperkuat kesejahteraan dan motivasi pelayanan RT/RW, kapasitas mereka dalam memfasilitasi komunikasi sosial, membangun solidaritas komunitas, serta mengorganisasi partisipasi warga di tingkat lingkungan diharapkan semakin meningkat. Kondisi ini pada akhirnya dapat memperkuat praktik *community governance*, yaitu model tata kelola pemerintahan yang menempatkan komunitas sebagai aktor penting dalam proses pembangunan daerah. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan institusi komunitas dalam tata kelola pemerintahan lokal mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sekaligus memperkuat hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah (Fonataba, 2025).

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak hanya berimplikasi pada penguatan kapasitas kelembagaan komunitas, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. RT dan RW dalam konteks ini berfungsi sebagai aktor sosial yang memiliki kedekatan langsung dengan warga sehingga mampu memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat (ARISMAN, 2025). Melalui peran tersebut, RT/RW dapat mendorong keterlibatan warga dalam berbagai aktivitas sosial dan pembangunan di tingkat lingkungan, seperti program kesehatan masyarakat, penguatan keamanan lingkungan, pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Dalam kerangka *governance* partisipatif, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan program, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan dipandang sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan

publikoleh pemerintah daerah. Dukungan kebijakan berupa peningkatan insentif finansial dapat memperkuat motivasi pelayanan serta komitmen sosial pengurus RT/RW dalam menjalankan fungsi tersebut. Dengan adanya dukungan tersebut, RT/RW diharapkan mampu meningkatkan intensitas koordinasi sosial dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan daerah sehingga tercipta mekanisme tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (ARISMAN, 2025).

Lebih jauh, penguatan partisipasi masyarakat melalui peran RT/RW juga berimplikasi pada peningkatan kualitas hubungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan lokal. Dalam perspektif *governance modern*, keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun jaringan kolaborasi dengan berbagai aktor sosial, termasuk institusi komunitas yang memiliki legitimasi sosial di tingkat lokal (Amelia, 2025). RT dan RW dalam hal ini memiliki kapasitas untuk memobilisasi solidaritas sosial serta membangun mekanisme koordinasi kolektif yang dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah secara lebih efektif. Dukungan insentif yang memadai tidak hanya meningkatkan kesejahteraan aktor komunitas, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial mereka sebagai representasi kepentingan warga di tingkat lingkungan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong terciptanya praktik *community governance*, yaitu model tata kelola pemerintahan yang menempatkan komunitas sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan daerah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penguatan institusi komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kualitas partisipasi publik serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (Sumarto, 2025).

Kebijakan peningkatan insentif bagi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dalam perspektif *governance modern*, keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif pemerintah, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antara pemerintah dan berbagai aktor sosial yang terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Nasution et al., 2025). RT dan RW sebagai institusi komunitas memiliki posisi strategis karena berada pada tingkat sosial yang paling dekat dengan masyarakat sehingga mampu menjalankan fungsi sebagai mediator komunikasi antara pemerintah daerah dan warga. Melalui peran tersebut, RT/RW dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial di tingkat lingkungan, seperti konflik sosial, ketimpangan kesejahteraan, kebutuhan pelayanan publik, serta dinamika sosial lainnya yang sering kali tidak sepenuhnya terdeteksi oleh birokrasi formal. Informasi yang dihimpun oleh RT/RW menjadi sumber data yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam kerangka *collaborative governance*, keterlibatan aktor komunitas yang memiliki kedekatan sosial dengan warga terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan serta memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan daerah (Wulandjani et al., 2025).

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif RT/RW juga berkontribusi terhadap penguatan praktik tata kelola pemerintahan berbasis komunitas yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Dukungan kebijakan berupa insentif finansial tidak hanya meningkatkan kesejahteraan aktor komunitas, tetapi juga memperkuat motivasi pelayanan serta tanggung jawab sosial mereka dalam menjalankan fungsi sosial-administratif di tingkat lingkungan (Subanda et al., 2025). Dengan adanya dukungan tersebut, RT/RW diharapkan mampu meningkatkan kualitas koordinasi sosial, memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta mendorong terciptanya mekanisme partisipasi warga yang lebih aktif dalam berbagai program pembangunan. Dalam perspektif *governance* lokal, penguatan kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan komunitas dapat meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem pemerintahan daerah (Mahlella, 2025).

### **Model Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Komunitas**

Model penguatan tata kelola pemerintahan berbasis komunitas merupakan pendekatan konseptual dalam administrasi publik yang menempatkan masyarakat sebagai aktor strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mahlella, 2025).

Dalam perkembangan teori *governance* kontemporer, paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah mengalami transformasi dari model hierarkis yang berpusat pada birokrasi menuju model tata kelola yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berbasis jaringan aktor sosial yang melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta organisasi komunitas dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam kerangka tersebut, institusi komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi yang sangat penting karena berada pada tingkat sosial yang paling dekat dengan masyarakat serta memiliki kapasitas sosial untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan warga. Keberadaan RT/RW memungkinkan terciptanya mekanisme koordinasi sosial yang lebih efektif dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta pengelolaan dinamika sosial di tingkat lingkungan. Dalam perspektif *governance* berbasis komunitas, RT/RW tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai fasilitator partisipasi masyarakat yang mampu memobilisasi keterlibatan warga dalam berbagai kegiatan pembangunan lokal. Pendekatan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi komunitas dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktor komunitas dalam sistem *governance* lokal mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sekaligus memperkuat legitimasi sosial pemerintah dalam proses pembangunan daerah (Fonataba, 2025).

Lebih lanjut, model penguatan *governance* berbasis komunitas juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan lokal sebagai prasyarat utama dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan publik pada tingkat akar rumput (Amelia, 2025). Dalam perspektif administrasi publik dan studi *governance modern*, kapasitas kelembagaan komunitas tidak hanya berkaitan dengan aspek struktural organisasi, tetapi juga mencakup kemampuan institusi lokal dalam melakukan koordinasi sosial, mengelola informasi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga, serta memobilisasi partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan. Kapasitas tersebut menjadi elemen penting karena institusi komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berperan sebagai aktor sosial yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan dinamika kehidupan masyarakat di tingkat lingkungan. Dalam konteks ini, dukungan kebijakan pemerintah daerah, termasuk melalui peningkatan insentif kelembagaan bagi RT/RW, dapat dipahami sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan komunitas dalam menjalankan fungsi sosial-administratifnya secara lebih efektif. Pemberian insentif tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi aktor komunitas, tetapi juga sebagai mekanisme kebijakan yang mampu meningkatkan motivasi pelayanan, komitmen kelembagaan, serta kinerja organisasi komunitas dalam mendukung implementasi berbagai program pembangunan daerah. Berbagai penelitian dalam kajian *governance* lokal menunjukkan bahwa penguatan kapasitas institusi komunitas melalui dukungan kebijakan, sumber daya, dan legitimasi kelembagaan yang memadai mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik sekaligus memperkuat praktik tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal (Amelia, 2025).

Pada akhirnya, model penguatan tata kelola pemerintahan berbasis komunitas menegaskan pentingnya sinergi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan institusi komunitas dalam menciptakan sistem pemerintahan lokal yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka *governance* kontemporer, pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, melainkan berperan sebagai fasilitator kebijakan yang menyediakan dukungan regulatif, sumber daya institusional, serta mekanisme koordinasi yang memungkinkan aktor sosial lainnya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan daerah. Dalam konteks ini, lembaga komunitas seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) berfungsi sebagai agen sosial yang menjembatani implementasi kebijakan pemerintah dengan dinamika kehidupan masyarakat pada tingkat lingkungan (Jannah et al., 2025). Peran tersebut memungkinkan terbangunnya mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga sehingga proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik dapat berlangsung secara lebih adaptif dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan institusi komunitas juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat tidak lagi diposisikan semata sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk terlibat secara aktif dalam proses

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. Berbagai studi *governance* menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan aktor komunitas mampu meningkatkan legitimasi kebijakan publik, memperkuat kepercayaan sosial, serta meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan di tingkat lokal (Agung, 2025).

#### D. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah berbasis komunitas. Sebagai institusi sosial yang berada pada tingkat paling dekat dengan masyarakat, RT/RW memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara pemerintah daerah dan warga dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pengelolaan informasi sosial masyarakat, hingga fasilitasi pelaksanaan program pembangunan di tingkat lingkungan. Dalam perspektif *governance modern*, keterlibatan institusi komunitas seperti RT/RW merupakan elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan peran RT/RW melalui kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat praktik *community governance* dalam sistem pemerintahan lokal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa institusi komunitas yang memiliki legitimasi sosial dan kedekatan dengan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan publik serta memperkuat hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Lebih lanjut, kebijakan peningkatan insentif bagi RT/RW dapat dipahami sebagai bentuk strategi pemberdayaan kelembagaan komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusional serta meningkatkan motivasi pelayanan para aktor komunitas dalam menjalankan fungsi sosial-administratifnya. Dukungan kebijakan berupa insentif finansial tidak hanya berperan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi RT/RW, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja kelembagaan, komitmen pelayanan, serta efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya dukungan kebijakan tersebut, RT/RW diharapkan mampu berperan lebih optimal dalam memobilisasi partisipasi masyarakat, memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan warga, serta mendukung implementasi berbagai program pembangunan di tingkat lingkungan. Pada akhirnya, penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis komunitas. Sejumlah studi dalam bidang administrasi publik dan *governance* lokal menegaskan bahwa penguatan institusi komunitas melalui dukungan kebijakan pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik serta keberhasilan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

#### E. Referensi

- Adhibah, A., Alam, U. M., & Munandar, M. A. (2022). Peran Institusi Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat: Studi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Pujonkidul Kabupaten Malang. *Sospol*, 8(1), 123–133.
- Agung, M. F. M. (2025). Strategi Collaborative Governance Dalam Reformasi Pelayanan Publik. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 11(1), 18–26.
- Amanullah, R. (2025). *Elaborasi Environmental, Social, And Governance Pada Lembaga Kemasyarakatan Di RT 004 RW 001 Banjar Sugihan Surabaya*. UPN Veteran Jawa Timur.
- Amelia, D. M. (2025). Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Keadilan Sosial Berbasis Komunitas. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 15–23.
- Arifin, Z. (2025). *Administrasi Pemerintahan Desa: Fondasi Tata Kelola Menuju Desa Mandiri*. Ganesha Kreasi Semesta.
- ARISMAN, P. (2025). *IMPLEMENTASI PROGRAM FORUM KOMUNIKASI RT/RW DI KECAMATAN TUAH MADANI*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Deviyanti, K. E., & Harmawan, B. N. (2023). Collaborative Governance Dalam Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak. *Journal Publicuho*, 6(4), 1456–1464.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1376–1395.
- Haifa, N. M., Nabilla, I., Rahmatika, V., Hidayatullah, R., & Harmonedi, H. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika*

- Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270.
- Harfianti, S. P., Illahi, M. F., Putri, P. A., Effendi, T. P., Tesa, T., Sari, R. I. P., & Valenzia, V. (2024). Tantangan dan strategi kepemimpinan masyarakat RT/RW Cendrawasih dalam menghadapi perubahan sosial. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 4931–4940.
- Hidayat, A. R., Burhanuddin, A., Yani, A. A., & Hans, A. (2021). Can Citizen Reporting System Be Effectively Constructed? A Study of Smart City Implementation in Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijak. Dan Adm. Publik)*, 25(2), 112–130.
- Jannah, L. H., Robby, R. A. P., & Kamil, P. (2025). *Kreativitas komunikasi digital husein basyaiban dalam berdakwah di tiktok untuk mengurangi konsumerisme beragama*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kartini, R. (2025). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam perspektif administrasi publik. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(12), 71–80.
- Kurniawan, M. I., Renggong, R., & Oner, B. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua RT-RW di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 429–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2619>
- Mahlella, N. (2025). Strategi Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 27–34.
- Nasution, K., Nasution, M. A., Rustiyana, R., Rachim, A., Baskoro, S. E., Reynilda, R., Devianty, T., Nampira, R. A., Lumbanraja, V., & Vidiastuti, D. P. (2025). *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Manajemen Modern: Inovasi, Tata Kelola, dan Akuntabilitas*. Star Digital Publishing.
- Nugraheni, W. P., Lestyoningrum, S. D., Kusnali, A., Faisal, D. R., Kurniasih, D. A. A., Rachmat, B., Purwatiningsih, Y., & Paramashanti, B. A. (2025). *Public Private Mix dalam Layanan Kesehatan*. CV Eureka Media Aksara.
- Nuryanto, S. P., & Sugiyanto, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Masyarakat Berbasis RW*. Deepublish.
- Saa, S. (2025). *KEBIJAKAN PUBLIK KONTEMPORER*. Dunia Penerbitan buku.
- Sanur, R., Santoso, A. P. A., & Isworo, E. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP DAMPAK TIDAK ADANYA PEMILIHAN PENGURUS LINGKUNGAN RT DAN RW. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(1).
- Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan penelitian kepustakaan*. Pradina Pustaka.
- Sitasari, N. W. (2022). Mengenal analisa konten dan analisa tematik dalam penelitian kualitatif. *Forum Ilmiah*, 19(1), 77–84.
- Subagiya, B. (2023). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian PAI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 43.
- Subanda, I. N., Si, M., & Yanthi, N. P. D. (2025). *Inovasi dan Dinamika Bantuan Sosial: Studi Kasus dan Refleksi Kebijakan*. Nilacakra Publishing House.
- Sumarto, H. S. (2025). *Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susanti, I., Ip, S., & Ap, M. (2025). *Pembangunan Kelembagaan Dalam Administrasi Publik*. Penerbit Berseri.
- Syaputra, M. (2023). *Strategi Kebijakan" Penataan Kelembagaan dan Perkuatan Fungsi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)" di Kota Makassar= Policy Strategy" Institutional Arrangement and Strengthening the Functions of Heads of Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW)" in Makassar City*. Universitas Hasanuddin.
- Tiawibowo, D. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Pengendalian Pencemaran Sungai. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(12), 51–60.
- Wahyudi, H. (2025). *Dasar-Dasar Teori Administrasi Negara: Perspektif Global dan Lokal*. JAKA MAULANA.
- Wisata, P. A., Sufianti, E., & Rahman, A. (2025). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kelurahan Kacapiring Kota Bandung. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 2302–2314.
- Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., Puspitasari, R., Purwanto, E., Amsyari, I., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.
- Zein, H. M. H. M., Soemaatmadja, H. R., Syamsul Bahri, M. M., Kusnadi, A., & Septiani, S. (2026). *Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Sada Kurnia Pustaka.